

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan bertujuan untuk mencapai cita - cita bangsa Indonesia yaitu mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan pembangunan yang merata agar taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan meningkat. Sejalan dengan penelitian dari Maabuat, Kantiagdaho & Laoh (2016) Pembangunan merupakan sebuah proses untuk memperbaiki segala aspek yang ada disuatu daerah kearah yang lebih baik lagi dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan disini dapat tercermin dari berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik serta berbagai aspek lainnya. Untuk mencapai pembangunan yang baik dan merata diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik pula pada daerah tersebut. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu daerah adalah rendahnya tingkat kemiskinan/jumlah penduduk miskin.

Sejalan dengan itu, kebijakan pemerintah daerah sendiri seharusnya dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi untuk melakukan pengelolaan yang efisien dan efektif terhadap daerahnya sendiri.(Kaffah dan Daryono, 2021) Dengan dibuatnya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1995 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal peran daerah untuk mengelola daerahnya sendiri memasuki era baru. Otonomi daerah sendiri merupakan pelimpahan kewenangan

yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Hal ini adalah tantangan tersendiri kepada pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat keluar dari permasalahan kompleks, misalnya kemiskinan. Ini merupakan kesempatan baik yang diberikan untuk pemerintah daerah agar lebih maksimal dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Didalam konteks perekonomian, kemiskinan sendiri merupakan suatu penyakit yang harus segera ditangani dan ditsembuhkan. (Susanto, Rochaida dan Ulfah, 2017) Di Indonesia penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,41% yaitu pada angka 10,19 % dari jumlah penduduk (BPS, 2020). Tingkat kemiskinan Nasional sendiri diperparah dengan terjadinya pandemi Covid – 19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan melumpuhkan berbagai sektor perekonomian. Angka ini akan terus bertambah apabila pemerintah tidak turun tangan dan melakukan pembenahan. Maka dari itu, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah lebih mendalam agar tidak semakin menyebabkan terjadinya kesenjangan terhadap taraf kesejahteraan hidup masyarakat, sebab kemiskinan merupakan akar dari berbagai permasalahan yang dapat terjadi disuatu negara, misalnya kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan dan masalah sosial lainnya.

Menurut penuturan dari Agustina, Syechalad & Hamzah (2018) Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung hanya dengan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, namun juga dengan bagaimana keberhasilan pemerintah dalam menuntaskan masalah kemiskinan yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri berfungsi sebagai alat analisis terhadap baik atau buruknya pembangunan

yang terjadi disuatu daerah serta bagaimana aktivitas ekonomi yang terjadi pada daerah tersebut apakah berpengaruh baik atau tidak terhadap taraf hidup dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Untuk melakukan upaya perbaikan dan pembangunan tentu tidak mudah, oleh karena itu pemerintah memberikan hak istimewa kepada daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi di berbagai negara didunia. Rendahnya tingkat kemiskinan merupakan indikator utama dari berhasilnya upaya pembangunan. (Satriyahadi,2020) Setiap tahunnya, pemerintah selalu meluncurkan berbagai program dan menggelontorkan banyak dana untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Kemiskinan ini sendiri merupakan akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya rendahnya pendidikan yang dapat ditempuh, kemudian akan berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran dikarenakan tidak memenuhi kriteria pekerja yang dibutuhkan. Masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pendapatan dan hidup dibawah garis kemiskinan pula tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta akses kesehatan yang layak ini juga dapat memicu meningkatnya kriminalitas yang terjadi dikarenakan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari, maka mereka akan menghalalkan berbagai cara. Oleh karena itu kemiskinan merupakan sebuah lingkaran yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk keluar dan tidak dapat berkembang serta cenderung mengalami kemunduran.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997) dalam penelitian Didu & Fauzi (2016) Kemiskinan merupakan tidak mempunya seseorang untuk melakukan pemenuhan

terhadap kebutuhan sehari – hari. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak serta sandang pangan yang merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Orang yang tidak dapat atau kesulitan memenuhi kebutuhannya ini dinamakan masyarakat miskin. Tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kegagalan suatu daerah dalam upaya mencapai tujuan atau cita – cita untuk menyejahterakan dan memperbaiki taraf hidup masyarakatnya. Besarnya jumlah penduduk disuatu daerah dalam upaya pembangunan daerah menjadi salah satu permasalahan pokok. Orang – orang yang hidup dibawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Salah pihak berkewajiban menyelesaikan permasalahan ini adalah pemerintah. Ada berbagai macam jenis kemiskinan, salah satunya adalah kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relatif* yang di klasifikasikan berdasarkan ukuran atau jumlah pendapatan Menurut (Sastramadja, 2003) dalam (Didu & Fauzi, 2016).

Surbakti, Marseto & Sishadiyati (2021) Dalam penelitiannya menjelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah peningkatan pada berbagai sektor perekonomian dan merupakan sebuah indikator terhadap maju atau mundurnya perekonomian disuatu negara, peningkatan ini dapat terjadi pada sektor barang ataupun jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cermin keberhasilan pemerintah dalam melakukan manajemen terhadap daerahnya sendiri untuk melakukan pembangunan. Upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mempercepat pembangunan serta diharapkan dapat segera menuntaskan masalah kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.

Selanjutnya menurut Penelitian dari Affandi dan Hamzah (2021) Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus mengalami peningkatan yang positif setiap tahunnya menjadi indikator bahwa suatu negara layak dikatakan maju dan memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan membuat pemerintah waspada akan terjadinya resesi dan depresi ekonomi yang dapat menyebabkan kekacauan pada kondisi masyarakat. Dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang berujung resesi ekonomi adalah terjadinya penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan tingginya pengangguran yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi akan berdampak buruk bagi perkembangan suatu wilayah apabila tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang baik serta terbatasnya ketersediaan barang kebutuhan masyarakat sehari – hari maka akan menjadi pecimu terjadinya kemiskinan. Lebih lanjut, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, oleh karena itu harus ada upaya penanganan serta analisis secara akurat agar tidak menimbulkan masalah lain dikemudian hari. Dalam upaya penanganan ini haruslah disiapkan strategi yang akurat, terstruktur dan tidak temporer, artinya strategi yang digunakan harus bersifat membangun secara berkelanjutan. (Ahmaddien, 2019)

Astuti, Hidayat dan Darwin (2017) Berpendapat bahwa, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya fertilitas, mortalitas serta migrasi.. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dipacu oleh tingginya angka fertilitas, apabila kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan baik, dalam jangka panjang akan tercipta tenaga kerja yang berkualitas yang dapat mendorong

perekonomian. Namun apabila segala faktor pendukung misalnya tingkat pendidikan rendah, kemiskinan tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang rendah maka tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak negatif dan memperparah kondisi sosial disuatu wilayah suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Kemudian sejalan dengan penelitian sebelumnya Menurut Mantra (2017) dalam Rafi Muhammad Sabiq (2021) Kepadatan penduduk yang tinggi merupakan awal dari terjadinya kemiskinan disuatu daerah, kepadatan penduduk sendiri merupakan komposisi dari nilai perbandingan jumlah masyarakat yang tinggal disuatu daerah dengan luas daerah yang dihuni. Kuantitas penduduk pada suatu daerah yang berlebihan dapat menjadi beban bagi daerah tersebut. Apabila kuantitas penduduk yang ada seimbang dengan ketersediaan Sumber daya yang mumpuni maka akan terjadi keseimbangan dalam siklus kehidupan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Namun apabila jumlah penduduk berlebih dan terjadi ketidak seimbangan antara sumber daya yang ada dengan jumlah penduduk maka akan memunculkan banyak masalah, misalnya kemiskinan karena menyebabkan sulitnya upaya pemerataan taraf hidup masyarakat. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi maka akan menyebabkan terjadinya ledakan populasi penduduk.

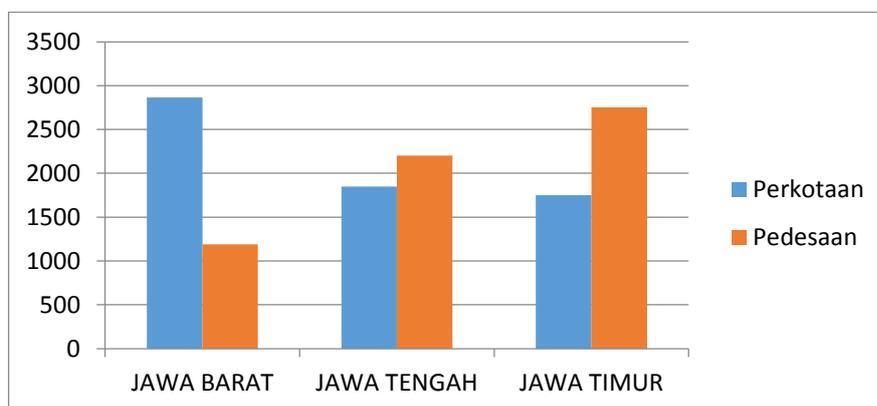
Prima Audia Daniel (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan yang terjadi pada perekonomian suatu wilayah yang mengarah kepada kenaikan harga – harga barang atau *price level* yang terjadi secara berkala yang disebabkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan arus uang. Inflasi juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis

perekonomian suatu wilayah selain indikator pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat inflasi yang tinggi maka akan dapat menyebabkan kenaikan harga – harga barang, kenaikan harga barang yang tidak didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan dapat memperparah kemiskinan disuatu wilayah karena harga barang – barang komoditas yang tinggi tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat yang rendah.

Grafik 1.1

Perbandingan kemiskinan Provinsi Dipulau Jawa

Berdasarkan Daerah Perkotaan dan Pedesaan tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Grafik 1.1 yaitu data kemiskinan di 3 Provinsi dipulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2020 berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, kemiskinan di Jawa Barat mencapai angka 2865,43 jiwa pada daerah perkotaan dan 1188,95 jiwa pada daerah pedesaan, selanjutnya kemiskinan pada wilayah Jawa Tengah sebesar 1848,07 jiwa pada wilayah perkotaan dan 2202,345 jiwa pada daerah pedesaan dan yang terakhir pada wilayah Jawa Timur tingkat kemiskinannya mencapai angka 1751,135 jiwa pada wilayah perkotaan dan 2751,405 jiwa pada wilayah pedesaan. (BPS, 2020)

Kemiskinan diwilayah Jawa Barat tahun 2020 berdasarkan daerah perkotaan adalah tertinggi apabila dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan survei yang dilakukan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) hal ini disebabkan oleh tingginya inflasi diwilayah perkotaan dan lebih kompleks nya masalah kemiskinan yang terjadi diwilayah perkotaan akibat banyaknya pengangguran dan terbatasnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.(BPS, 2020)

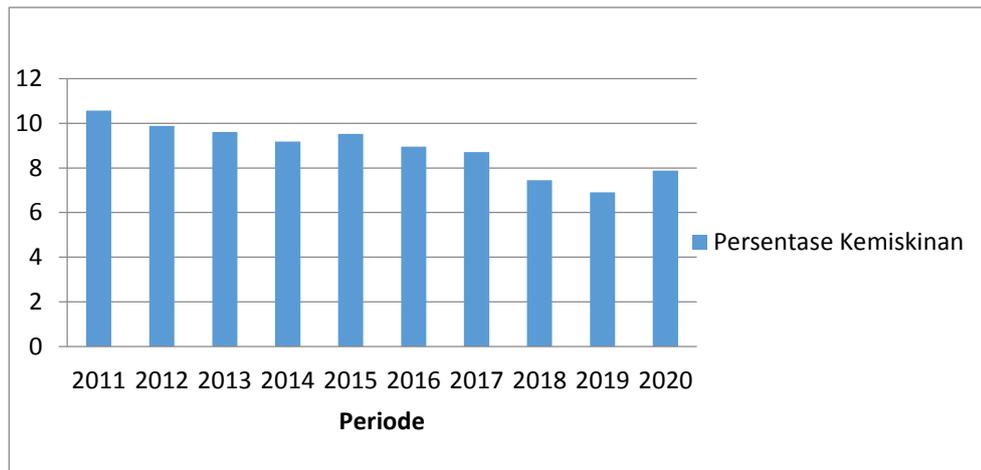
Jawa Barat sendiri merupakan salah satu wilayah yang cukup luas dan terdiri 18 kabupaten dan 9 kota dengan ibu kota provinsi yaitu Kota Bandung dengan luas yaitu sebesar 35377,76 km² dengan jumlah penduduk sebesar 49.935.858 Jiwa. Pada Maret tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat sendiri berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 15 dari 27 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi diatas rata – rata Provinsi. Kota Tasikmalaya sendiri merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 14,8%. Selanjutnya berdasarkan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 3.615,79 ribu jiwa atau sekitar 7,45% dari total penduduk Jawa Barat sendiri (BPS, 2018).

Berikut ini merupakan Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat pada rentang periode 2011 – 2020 :

Grafik 1.2

Tingkat kemiskinan (Persen) Provinsi Jawa Barat 10 tahun terakhir

(2011 – 2020)

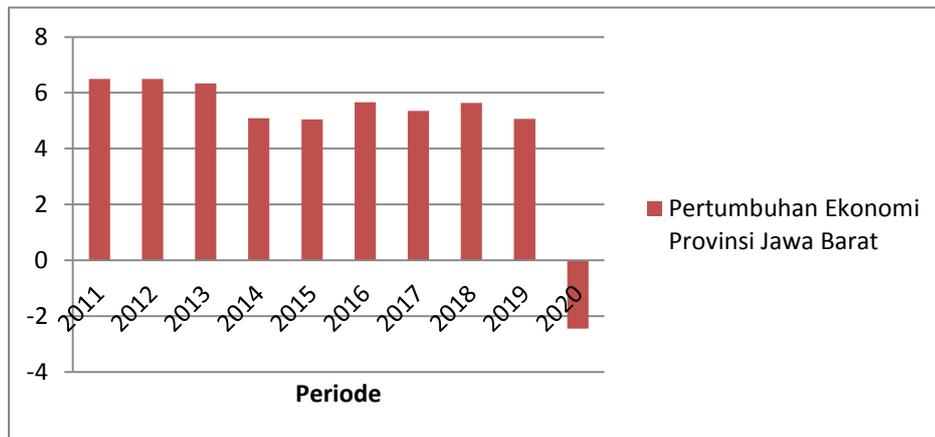


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2011 -2020

Menurut Grafik 1.2 data tingkat penduduk miskin dari Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 – 2020 dapat dilihat bahwa data tersebut bersifat fluktuatif atau cenderung naik turun. Pada tahun 2011 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 10.57 % pada tiga tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi masing – masing sebesar 9.88%, 9.61% dan 9.18%. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin naik menjadi 9.53% dan kemudian kembali mengalami penurunan yang konstan pada empat tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masing – masing sebesar 8.95%, 8.71%, 7.45% dan 6.91%. Kemudian yang terakhir pada tahun 2020 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat kembali mengalami kenaikan dengan adanya pandemi Covid – 19 yaitu sebesar 7.88%. Hal tersebut menyebabkan semakin beratnya beban masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari dan semakin jauh dari kesejahteraan yang diharapkan. (Sumber: Badan Pusat Statistik).

Grafik 1.3

**Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat 10 tahun terakhir
(2011 – 2020)**



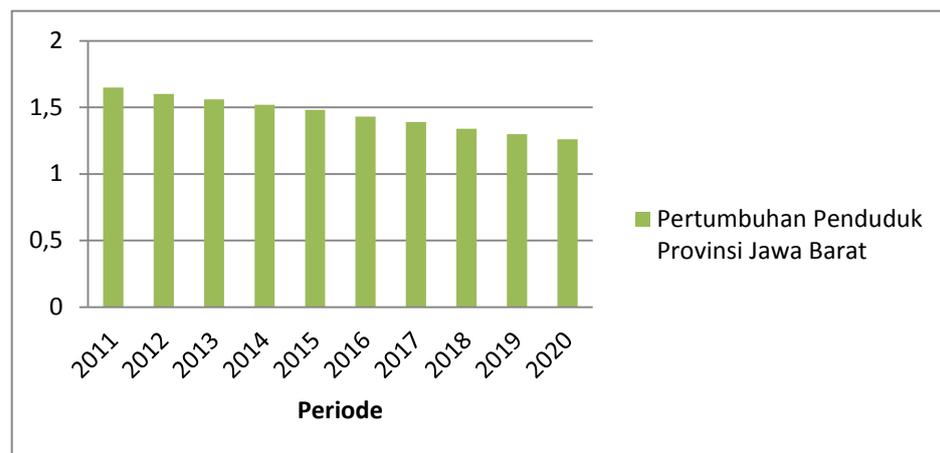
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2011 -2020

Selanjutnya pada Grafik 1.3 terdapat data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang juga bersifat fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi stabil yaitu sebesar 6.5 %, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 6.33 %, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 dan 2015 pada angka yang sama yaitu sebesar 5.0%, pada tahun selanjutnya yaitu 2016 pertumbuhan ekonomi di Jawa barat kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 5.66 % dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.34 % selanjutnya di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar 5.64% dan kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 yaitu sebesar 5.0 % Kemudian yang terakhir pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami kemerosotan yang sangat drastis yaitu mencapai angka -2.44 % di

karenakan adanya pandemi Covid – 19 yang melanda seluruh dunia dan melumpuhkan berbagai sektor perekonomian.

Grafik 1.4

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat 10 tahun terakhir (2011 – 2020)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2011 -2020

Kemudian ada data laju pertumbuhan penduduk pada Provinsi Jawa Barat periode tahun 2011 – 2020 pada Grafik 1.4. Pada data diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 - 2020 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya namun tidak signifikan. Ditahun 2011 laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 1.65 % kemudian mengalami penurunan yang konstan secara berturut - turut, yaitu pada tahun 2012 mencapai 1.6%, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 1.56%, dan terus mengalami penurunan pada tahun - tahun selanjutnya yaitu sebesar 1.52 % pada tahun 2014, sebesar 1.48% pada tahun 2015, sebesar 1.43% pada tahun 2016, sebesar 1.39 % pada tahun 2017, sebesar 1.34% pada tahun 2018, sebesar 1.3% pada tahun 2019 dan mencapai 1.26% pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, variabel pertumbuhan penduduk dan variabel tingkat inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Barat lebih lanjut, maka peneliti mengangkat topik penelitian mengenai “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat” ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan masalah untuk menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Penelitian meliputi data selama periode tahun 2006 sampai dengan 2020 di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen dan Pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat inflasi sebagai variabel independen

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan untuk melakukan pembenahan dalam upaya menuntaskan kemiskinan.
2. Dapat memberikan sumbangsih terhadap referensi dalam kajian ilmu ekonomi pembangunan.